

## ***SOEKARNO AND JAVANESE SOVEREIGNTY CONCEPT CASE STUDY: GUIDED DEMOCRACY ERA***

**Elisabeth Ermuliana Kembaren**

Universitas Indonesia

elisabeth.ermuliana.kembaren@gmail.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas mengenai pengaruh paham kekuasaan jawa dalam praktik-praktik kekuasaan soekarno pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965). Demokrasi terpimpin melakukan penyelewengan pemisahan kekuasaan sebagaimana dalam asas trias politica. Soekarno menjadi pusat dari kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain pendekatan historis yang deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Teori yang digunakan didasarkan pada pendekatan paham kekuasaan jawa, dimana raja sebagai pusat dari kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa pemusatan kekuasaan yang dilakukan soekarno pada era demokrasi terpimpin merefleksikan penerapan paham kekuasaan jawa sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja jawa pada masa lampau. Praktik-praktik yang mencerminkan paham kekuasaan jawa meliputi ditinggalkannya asas trias politica, kebijakan nasakom, dilakukannya proyek-proyek mercusuar sampai dengan penerapan simbolisasi kekuasaan.*

**Kata Kunci:** Paham kekuasaan jawa; Demokrasi terpimpin; Soekarno

### **Abstract**

*This research discusses the influence of the Javanese sovereignty concept in the practices of Soekarno's regime under the Guided Democracy era (1959-1965). Guided democracy has corrupted the separation of powers in trias politica. The research is a qualitative research designed with a historical, descriptive approach that using literature study. The theory employed based on the javanese sovereignty concept, where kings are the centers of the sovereignty. The research finds that the centralization of power in Soekarno's regime under the Guided Democracy era reflects the implementation of the Javanese sovereignty concepts as adopted by the kings in the past. The practices that reflect Javanese sovereignty concept in such as the abandonments of the trias politica, Nasakom, as well as the so-called "lighthouse" projects and the application of symbolization of power.*

**Keywords:** Javanese; Sovereignty concept; Guided democracy; Soekarno

## Pendahuluan

Setelah meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia secara konsisten mengalami beragam gejolak sosial, politik dan ekonomi yang dapat mengancam keutuhan negara. Tak hanya itu, Indonesia masih harus dihadapkan dengan serangkaian persoalan perundingan dan upaya diplomasi internasional khususnya dengan Belanda.<sup>1</sup> Selama pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966, Indonesia selalu mengalami transformasi konstitusi dan bentuk pemerintahan. *Pertama*, pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem presidensial yang didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945. Namun pada November 1945 berubah menjadi sistem parlementer. *Kedua*, pada tahun 1949 Indonesia mengubah kembali bentuk pemerintahannya menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai konsekuensi dari upaya diplomasi dan perundingan internasional. Namun pada 17 Agustus 1950 RIS dengan resmi dibubarkan.<sup>2</sup> Setelah itu, Indonesia kembali menggunakan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didasarkan pada Undang-undang Sementara (UUDS). Menguatnya instabilitas sosial politik pada masa demokrasi liberal ini (1949 – 1959) menyebabkan jatuh banggunya kabinet. Bahkan secara rata-rata umur pemerintahan hanya berkisar 1 tahun saja.<sup>3</sup>

Sebagai respons terhadap situasi politik yang kian memanas, akhirnya pada maret 1957 Presiden Soekarno mengumumkan keadaan darurat perang di seluruh wilayah Indonesia dengan menetapkan Undang-undang Darurat Keadaan Bahaya (*Staat van Orlog en Beleg*, SOB). Hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Kemudian pada tahun 1958 saat situasi sudah dapat lebih teratasi, dengan dukungan golongan militer, Soekarno berupaya merubah sistem demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin secara resmi diberlakukan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Secara fundamental artinya terdapat perubahan sistem politik dibawah satu kekuasaan otoriter Soekarno.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Beragam perundingan dilakukan oleh Indonesia seperti halnya Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen, Perundingan KMB sampai dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 123-172

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 209.

<sup>3</sup> Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Reprint Edition)* (Jakarta: Equinox Publishing, 2007), hlm. 46-555.

<sup>4</sup> Dalam konteks ini presiden bukanlah diktator yang memiliki kekuasaan tidak terbatas, meskipun kekuasaan lembaga eksekutif dan yudikatif dibawah kontrolnya. Sistem pengambilan keputusan yang didasarkan oleh voting dalam demokrasi liberal dianggapnya kurang cocok dengan kultur khas Indonesia yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat. Lihat John D Legge, *Sukarno: Sebuah Biografi Politik* (Jakarta: CV. Muliasari, 1985), hlm. 364-365.

Demokrasi dipimpin melakukan praktik-praktik penyelewengan pemisahan kekuasaan dalam asas *trias politica*<sup>5</sup>. *Pertama*, secara kelembagaan kekuasaan legislatif dan yudikatif berada dibawah kendali Soekarno sebagai kepala eksekutif. Ketua DPR Gotong Royong (DPR-GR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai pemegang kekuasaan legislatif diberikan mandat untuk merangkap jabatan sebagai menteri. Tak hanya itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan yudikatif juga ditugaskan merangkap jabatan sebagai menteri.<sup>6</sup> *Kedua*, Soekarno memiliki wewenang untuk membubarkan badan legislatif yakni DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikannya dengan DPR-GR. *Ketiga*, dikeluarkannya UU No.19/1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa presiden dapat turut campur dalam persoalan pengadilan. Jelas terlihat bahwa wewenang badan yudikatif sekalipun mendapatkan intervensi dari Soekarno.<sup>7</sup> *Keempat*, dikeluarkannya Ketetapan MPRS No.III/1963 tentang pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno menjadi Presiden seumur hidup. Hal tersebut jelas bertentangan dengan fungsi dasar *trias politica* dan ketentuan UUD 1945 dalam hal pengaturan masa jabatan yang terbatas.

Secara individu, soekarno selalu dianggap banyak menyerap pemikiran politik barat seperti marxisme, komunisme dan bahkan islam sekalipun. Namun nampaknya, tidak terlalu sering ia diidentikkan dengan pemikiran yang bersifat tradisional jawa.<sup>8</sup> Dalam perjalanan hidupnya, Soekarno memang selalu dekat dengan lingkungan kebudayaan jawa yang kuat. Pengaruh kebudayaan jawa begitu kuat dalam proses pembentukan pemikiran, kepribadian serta karakternya.<sup>9</sup> Pemusatan kekuasaan yang dipraktikkan oleh Soekarno selama masa demokrasi terpimpin (1959-1965) terlihat dipengaruhi oleh pemikiran tradisionalisme jawa yang juga kuat dipengaruhi konsep hindu-buddha.

Pemikiran tradisional jawa atau paham kekuasaan jawa percaya bahwa seorang pemimpin merupakan pusat dari kekuasaan yang merangkap sebagai agen penyelaras kosmos. Pengkonsentrasian kekuasaan merupakan hal mutlak dilakukan oleh seorang pemimpin mengingat

---

<sup>5</sup> *Trias politica* merupakan prinsip normatif dimana kekuasaan idealnya tidak diberikan kepada orang yang sama sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.130.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Isbodroini Suyanto, *Neo Tradisionalisme dalam Politik dengan Kasus Beberapa Pemikiran Politik Soekarno* (Skripsi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1978), hlm.iii.

<sup>9</sup> Cindy Adams, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2011), hlm. 21-37.

hal tersebut mencerminkan seberapa besarnya kekuasaan yang ia miliki. Semakin besar kekuasaannya maka semakin eksklusif segala kekuatan yang berasal daripadanya.<sup>10</sup> Pemimpin memiliki kekuasaan yang absolut dan dapat diandaikan sebagai sebuah besi berani yang mengatur bubuk-bubuk besi yang berserakan menjadi bidang yang berpola.<sup>11</sup>

Soekarno menggunakan legitimasi kekuasaan dalam paham kekuasaan jawa dengan mengkaitkan dirinya sebagai keturunan dari kelas yang berkuasa. Ia mengaku dilahirkan dari keturunan langsung Raja Singaraja terakhir dari pihak ibu dan keturunan Jayabaya kesultanan kediri dari pihak ayah.<sup>12</sup> Selayaknya raja jawa pada umumnya, dia menganggap dirinya sebagai ‘bapak’ untuk rakyatnya dengan menyebut dirinya sebagai *penyambung lidah rakyat*. Tak hanya itu, konsep ‘Nasionalis, Agama, dan komunis’ (Nasakom) yang kembali dilontarkan pada masa ini sarat dengan simbol kekuasaan dalam paham kekuasaan jawa. Melalui Ketetapan Presiden No.7/1959 Nasakom disebut sebagai bentuk aliran kerjasama aliran politis ideologis yang hidup nyata berdampingan dalam masyarakat Indonesia. Nasakom bagi sebagian pihak yang tidak mengerti budaya jawa hanya dipandang sebagai perilaku kebijakan manipulatif dan kompromistis yang terlalu dipaksakan demi mendapatkan kekuasaan.<sup>13</sup> Dalam paham kekuasaan jawa, keberhasilan seorang pemimpin ditunjukkan dengan menyerap semua unsur yang ada yang dalam hal ini tiga ideologi yang saling bertentangan dalam nasakom. Dari uraian latar belakang diatas, nampak bahwa terdapat korelasi dan pengaruh paham kekuasaan jawa dalam praktik-praktik kekuasaan Soekarno era demokrasi terpimpin. Dengan demikian timbul pertanyaan **bagaimana pengaruh paham kekuasaan jawa terhadap praktik-praktik kekuasaan Soekarno era demokrasi terpimpin?**

Sebenarnya sudah banyak tulisan lintas keilmuan yang meneliti mengenai pengaruh paham kekuasaan jawa terkait Soekarno. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif pengaruh paham kekuasaan jawa terhadap praktik-praktik kekuasaan Soekarno era demokrasi terpimpin. Tulisan ini secara spesifik membatasi rentang waktu pembahasan hanya pada masa

---

<sup>10</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm.100-101.

<sup>11</sup> Benedict R.O’G Anderson dalam Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 65.

<sup>12</sup> Benedict Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1990), hlm. 39.

<sup>13</sup> Elisabeth Ermuliana Kembaren, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa Dalam Praktik-Praktik Kekuasaan Soekarno Era Demokrasi Terpimpin* (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012), hlm.7.

demokrasi terpimpin (1959-1965). Adapun praktik-praktik kekuasaan Soekarno meliputi pemusatan kekuasaan dibawah Presiden, ditinggalkannya asas *trias politica*, kebijakan nasakom, penerapan simbol-simbol kekuasaan dan beragam proyek mercusuar.

## **Kerangka Konseptual : Paham Kekuasaan Jawa**

Dalam memandang kekuasaan atau *power*, terdapat perbedaan fundamental yang dimiliki oleh konsep kekuasaan jawa dengan konsep kekuasaan barat. Paham kekuasaan Jawa menurut Benedict R.O.G Anderson mengandung empat ciri pokok, yaitu: kekuasaan itu konkrit, kekuasaan itu homogen, akumulasi kekuasaan dalam alam semesta selalu tetap, serta kekuasaan itu tidak mempersoalkan dari mana ia berasal.<sup>14</sup>

### *1. Kekuasaan itu konkrit*

Anderson menyatakan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang teoritis atau abstrak sebagaimana pengertian dalam konsep barat. Kekuasaan merupakan suatu realitas yang ada karena berasal dari Tuhan, dan oleh karenanya siapapun yang mendapatkannya tidak perlu dipertanyakan keabsahannya. Kekuasaan juga bersifat adikodrati sehingga ia tidak memiliki implikasi moral yang inheren.

### *2. Kekuasaan itu homogen*

Konsepsi ini menyatakan bahwa semua kekuasaan sama jenisnya dan sama pula sumbernya. Tidak ada bedanya kekuasaan yang berada dibawah individu dan kelompok.

### *3. Akumulasi kekuasaan dalam alam semesta selalu tetap*

Dikarenakan kekuasaan itu berasal dari sumber tunggal yang homogen, maka jika terdapat kekuasaan yang besar secara otomatis kekuasaan di tempat lain “berjumlah” lebih sedikit. Jika dilihat dari perspektif teori politik, pendapat ini memiliki akibat yang penting dimana terpusatnya kekuasaan disatu pihak mengharuskan adanya pengurangan jumlah kekuasaan ditempat lain dalam jumlah yang sebanding.

### *4. Kekuasaan itu tidak mempersoalkan dari mana ia berasal*

---

<sup>14</sup> Benedict R.O’G Anderson dalam Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 51.

# PARAPOLITIKA

Journal of Politics And Democracy

Vol.2 No.2, 2021

Dikarenakan kekuasaan bersumber dari satu sumber homogen yang berasal dari Tuhan, maka bagi siapapun yang mendapatkannya tidak lagi memerlukan pengabsahan dari kekuasaan tersebut.

Konsekuensi dari pandangan kekuasaan Jawa menyebabkan hal-hal yang bersifat spiritual seperti wahyu, pulung, andaru, dipercaya memberikan kekuatan dan kekuasaan bagi mereka yang mendapatkannya. Paham kekuasaan Jawa percaya bahwa raja merupakan pusat dari segala kekuasaan. Sebenarnya hal ini merupakan hasil dari konsepsi kosmologis.<sup>15</sup> Kerajaan harus merupakan gambaran atau refleksi alam semesta (*great cosmic order*). Konsep kosmologis tersebut percaya bahwa manusia senantiasa berada dibawah pengaruh tenaga-tenaga yang bersumber pada penjuru mata angin, bintang-bintang serta planet-planet. Dalam praktiknya, tata susunan kerajaan digambarkan secara simbolis mendekati tata susunan jagad tersebut. Keselarasan secara simbolik tampak pada jumlah permaisuri raja, para Menteri, penggunaan gelar-gelar, pada pembangunan bangunan atau candi.<sup>16</sup> Gelar-gelar raja mencerminkan pengertian kosmis. Sebagai ilustrasi penggunaan kata-kata yang berarti alam semesta (buwono/bumi) dan dunia alamiah (alam) secara konsisten terdapat dalam gelar-gelar raja Jawa, contohnya gelar Hamengkubuwono (yang memangku dunia), Pakubuwono (pemersatu dunia), Paku Alam (pemersatu alam).<sup>17</sup>

Raja merupakan penghubung tunggal antara dunia makrokosmos (*jagad gedhe*) dengan mikrokosmos (*jagad cilik*) yang berfungsi untuk menyelaraskan keadaan yang *tata tentrem karta raharja*, dimana terciptanya keselarasan. Sebagai konsekuensi bahwa raja dianggap sebagai wakil Tuhan dimuka bumi maka ia memiliki semua kekuasaan negara secara mutlak. Kekuasaan absolut yang dimiliki raja bukan berarti dapat dipergunakan secara semena-mena. Sesungguhnya ia memegang peranan yang berat mengingat kekuasaan yang dimilikinya harus menjalankan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Paham kekuasaan Jawa memiliki implikasi dalam memandang konsep kedaulatan, integritas teritorial dan pola hubungan-hubungan luar negeri. Secara singkat kekuasaan negara

---

<sup>15</sup> Robert Heine Geldern, *Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia* (Ithaca, New York: Southeast Asia Program Cornell University, 1956), hlm. 1.

<sup>16</sup> Isbodroini Suyanto, *Op.Cit.*, hlm.65.

<sup>17</sup> Benedict R.O’G Anderson dalam Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm.82.

tidak secara spesifik ditentukan oleh batas wilayahnya melainkan oleh pusatnya. Kekuasaan dapat diumpamakan seperti cahaya bola lampu yang berangsur-angsur melemah menjauhi pusatnya. Pengertian tersebut menggambarkan orientasi kepada pusat yang begitu kuat (*centripetality*).<sup>18</sup>

Paham kekuasaan Jawa percaya bahwa seorang penguasa harus dapat mengkonsentrasikan kekuasaan yang ada disekelilingnya. Segala individu dan benda yang dia pegang memiliki kekuasaan yang tidak biasa. Istana raja tidak hanya diisi oleh benda-benda pusaka namun juga seperti orang-orang yang tidak biasa seperti albino, orang kerdil, badut hingga peramal. Dipercayai kekuatan mereka menambah kekuatan penguasa.<sup>19</sup> Singkatnya, raja melakukan penaklukan sinkretisme dalam keseimbangan kosmologis.

## Metodelogi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka yang menitikberatkan pada analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun informasi berdasarkan studi pustaka terhadap berbagai buku, jurnal, dokumen baik cetak maupun digital. Hal ini dilakukan mengingat permasalahan yang ingin dibahas dari penelitian ini hanya dapat dijawab dengan penelitian Pustaka yang tidak memerlukan data yang dihimpun melalui riset lapangan.

## Pembahasan

### Klaim Legitimasi Kekuasaan Soekarno

Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Idayu. Dalam buku otobiografinya, ia mengaku dilahirkan dari kelas yang berkuasa.<sup>20</sup> Ayahnya merupakan keturunan kesultanan kediri, sementara ibunya merupakan keponakan dari Raja Singaraja terakhir yang berasal dari kasta brahmana di Bali. Penulis tidak perlu mempermasalahkan kebenaran dari geanologi yang diklaim oleh Soekarno, yang menjadi penting untuk dibahas ialah mengapa hal tersebut dibuat?<sup>21</sup> Soekarno percaya bahwa hari kelahirannya dibawah bintang (zodiac) gemini yang memiliki simbol anak kembar menjadi satu melambangkan kekuatan penggabungan dua unsur yang bertentangan. Ia mengakui memiliki sifat yang

---

<sup>18</sup> Benedict Anderson, *Op.Cit.*, hlm.43

<sup>19</sup> Benedict Anderson, *Op.Cit.*, hlm.27

<sup>20</sup> Cindy adams, *Op.Cit.*, hlm.23

<sup>21</sup> Benedict Anderson, *Op.Cit.*, hlm.40.

bertentangan. Ia bisa bersikap lemah lembut, namun bisa bersikap keras seperti baja. Ia bisa dengan mudah menjebloskan musuh-musuh negara kedalam penjara, namun ia bisa tidak tega membiarkan burung terkurung didalam sangkar.<sup>22</sup> Menurutny dengan memiliki sifat demikian, ia percaya dapat menjembatani semua pertentangan, lebih memahami semua pihak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

Kedekatan Soekarno dengan cerita dalam pewayangan banyak tercermin dalam beragam tulisan, pidato hingga sikap politiknya. Melalui tulisan-tulisannya dalam surat kabar pada tahun 1920an ia selalu menggunakan nama samaran “Bima”. Bima merupakan tokoh sentral dalam Mahabaratha. Ia dikenal sebagai sosok ksatria yang tegas dan tak kenal kompromi dengan musuhnya. Soekarno amat terkesan dengan tokoh “Bima” dan menganggapnya sebagai sosok pahlawan dimasa kecilnya.<sup>23</sup> Dalam pidato-pidatonya, ia pun banyak menggunakan perumpamaan dalam cerita pewayangan untuk menggambarkan perjuangan nasional keluar dari kolonialisme selayaknya kaum pandawa yang harus merebut tahta dari pihak kurawa. Ia pun juga mengesankan dirinya sebagai Ratu Adil, yakni konsepsi ramalan jayabaya yang sudah lama mengakar dalam masyarakat jawa dimana akan ada sosok pemimpin yang membawa Indonesia keluar dari masa gelap (penjajahan). Konsep tersebut semakin memperkuat psikologis harapan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sosok Ratu Adil dalam diri Soekarno.<sup>24</sup> Selain dengan membangkitkan romantisme kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia dimasa lampau, Soekarno juga selalu menggunakan kata-kata penuh kuasa sebagai daya tarik bagi pendengarnya seperti misalnya kata-kata *Pancasila, Revolusi, Saptamarga*.

Sama seperti dengan raja jawa pada umumnya yang menggunakan gelar untuk memperkuat legitimasinya, Soekarno juga memiliki beragam gelar yang memberi makna akan kebesarannya. Salah satu gelar yang paling populer ia pakai ialah *Penyambung lidah rakyat*. Hal tersebut menggambarkan konsep *vox populi* atau suara rakyat.<sup>25</sup> Ia mencitrakan dirinya sebagai ‘bapak’

---

<sup>22</sup> Sebagai salah satu contoh, suatu hari datanglah seorang bapak disertai anaknya dari Maluku ingin bertemu dan mempersembahkan seekor burung Nuri Raja kepada Soekarno. Soekarno menerima pemberian tersebut, namun pada akhirnya ia malah melepaskan burung tersebut ke udara. Ia pun berpendapat bahwa burung tersebut akan jauh lebih senang terbang kemana-mana, sama halnya sebagaimana manusia ingin merdeka selama-lamanya. Bambang Widjanarko, *Sewindu Dekat Bung Karno* (Jakarta: PT.Gramedia, 1988), hlm. 21-22.

<sup>23</sup> Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm.32.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. xxiii.

<sup>25</sup> Benedict Anderson, *Op.Cit.*, hlm.62



yang paling tahu kehendak rakyatnya. Hal ini mencerminkan hubungan antara *kawula-gusti* atau rakyat dan penguasanya dalam paham kekuasaan jawa. Penguasa yang ideal dianggap paling tahu akan kebutuhan rakyatnya. Terlihat gelar tersebut bukan merupakan pernyataan komitmen melainkan lebih untuk menunjukkan kekuasaan yang ia miliki. *Kedua*, dalam gelar *Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat*, ia menunjukkan keprihatinannya pada si miskin yang besar jumlahnya. Ia juga bertindak sebagai pemimpin yang mengemban aspirasi masyarakat.<sup>26</sup> Disamping itu ia juga banyak menggunakan gelar-gelar lain seperti *Pemimpin Besar Revolusi*, *Pramuka Agung* yang pada fungsinya masih sama yakni memperkuat legitimasinya sebagai pemimpin.

## Simbolisasi Kekuasaan Soekarno

Paham kekuasaan jawa percaya bahwa kesuburan seksual seorang penguasa merupakan pertanda penting bagi kekuasaan yang dimilikinya. Air maninya merupakan perlambang mikrokosmis dari kekuasaan yang dipusatkannya. Kehidupan seksual soekarno memberikan paralelisasi modern dalam gagasan kuno ini.<sup>27</sup> Ia dikenal memiliki banyak istri dan anak. Kebalikannya, jika terjadi adanya penurunan aktivitas seksual maka hal tersebut dapat dipandang sebagai pertanda memudarnya kekuasaan. Menariknya, pada masa ini tindakan tersebut tidak berdampak negatif secara politik bagi dirinya. Bahkan pada periode akhir demokrasi terpimpin, tercatat adanya kecurigaan tentang pemberitaan terkait kehidupan personal Soekarno secara berlebihan oleh orang-orang dekat istana.<sup>28</sup> Hal tersebut dapat dilihat sebagai usaha untuk menjaga otoritas Soekarno.

Praktik-praktik kekuasaan Soekarno selalu mencerminkan simbol-simbol pemanggilan kekuasaan. *Pertama*, pertunjukkan wayang yang diadakan di istana presiden selalu menggambarkan cerita yang relevan dengan keadaan politik terkini. *Kedua*, pemanggilan para tokoh pemimpin dari berbagai kelompok spiritual dan mistis untuk berpartisipasi mengkampanyekan perebutan irian barat dari belanda (1961-1962). *Ketiga*, pidato-pidato Soekarno selalu menggunakan kata-kata penuh makna yang membangkitkan rasa nasioalisme. *Keempat*, pembangunan Monas (Monumen Nasional) dinilai sebagai usaha menegakkan *lingga*

---

<sup>26</sup> Elisabeth Ermuliana Kembaren, *Op.Cit.*, hlm.70.

<sup>27</sup> Benedict Anderson, *Op.Cit.*, hlm. 32.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

(*sacred phallus*) versi modern bersamaan dengan perjuangan merebut Irian Barat. *Kelima*, pembangunan proyek-proyek mercusuar seperti Stadion Gelora, Masjid Istiqlal, Hotel Indonesia, Monumen Pembebasan Irian Barat ingin menunjukkan kebesaran Indonesia yang mampu melebihi simbol-simbol yang dimiliki negara lain. *Keenam*, pembentukan *Conference of The New Emerging Forces* (CONEFO) setelah Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebagai salah satu upaya mempersiapkan organisasi tandingan yang bisa mengimbangi PBB. *Ketujuh*, pembentukan *Games of New Emerging Forces* (GANEFO) setelah Indonesia keluar dari keanggotaan Komite Olimpiade Internasional bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia ketidakbergantungannya pada kekuatan-kekuatan dunia yang ada.

## **Pemusatan Kekuasaan Soekarno Sebagai Refleksi Paham Kekuasaan Jawa**

Ketidakstabilan sosial politik yang membuat jatuh banggunya kabinet pada masa sebelum demokrasi terpimpin membuat Soekarno ingin mengendalikan keadaan. Terbukti secara kelembagaan, Soekarno secara praktis menjadi pimpinan seluruh badan legislatif dan yudikatif. Soekarno menjadi pusat dari kekuasaan yang dalam sudut pandang barat merupakan pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan nama demokrasi. Demokrasi terpimpin berusaha menawarkan sistem musyawarah mufakat yang kontras dengan sistem voting ala barat.<sup>29</sup> Asas gotong royong (mengerjakan sesuatu secara bersama-sama) yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia berusaha menggantikan nilai-nilai barat dalam *trias politica*. Sistem musyawarah mufakat merupakan cara pengambilan keputusan bersama yang dipimpin oleh seorang pemimpin, dalam konteks demokrasi terpimpin jelas ialah Soekarno. Asas gotong royong inilah yang mempengaruhi Soekarno untuk mendirikan Dewan Nasional (yang nantinya akan berubah menjadi DPA), DPR-GR, dan MPRS.<sup>30</sup>

Praktik-praktik pemusatan kekuasaan secara kelembagaan dibawah Soekarno sebagai juru kunci mencerminkan praktik kekuasaan jawa. Paham kekuasaan jawa secara implisit menolak hal-hal yang sifatnya memisahkan atau otonom.<sup>31</sup> Bahkan dengan dikeluarkannya UU No.19/1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa presiden dapat turut campur

---

<sup>29</sup> Isbodroini Suyanto, *Op.Cit.*, hlm.33.

<sup>30</sup> Elisabeth Ermuliana Kembaren, *Op.Cit.*, hlm.76.

<sup>31</sup> Elisabeth Ermuliana Kembaren, *Op.Cit.*, hlm.78.

dalam persoalan pengadilan, semakin mempertegas posisi Soekarno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi layaknya raja jawa.

Pemusatan populasi yang besar disekitar penguasa menandakan adanya daya tarik magnet yang dapat menjelaskan kepemilikan wahyu sang penguasa. Pandangan ini dapat membantu menjelaskan mengapa Soekarno secara konsisten menolak kontrol kelahiran. Diluar pandangan pribadinya, hal ini lebih mencerminkan keputusan politik. Soekarno selalu dengan bangga mengatakan bahwa Indonesia merupakan populasi terbesar kelima di dunia. Dengan memiliki populasi yang cukup besar di dunia, ia dapat menunjukkan signifikansi kekuatannya dalam konstelasi politik global.

Konsolidasi demokrasi dipimpin ditandai dengan peningkatan sejumlah menteri secara tajam yang diisi oleh tokoh kunci militer dan sipil dalam birokrasi. Tak hanya itu, Soekarno juga menunjuk sejumlah kepala daerah untuk mengisi posisi gubernur dan bupati. Penunjukan ini berbasis pada loyalitas dibandingkan dengan kompetensi.<sup>32</sup> Menariknya, dalam konteks penunjukan Menteri seperti Subandrio, Roeslan Abdulgani, Prijono dan beberapa politisi islam dipersepsikan sebagai salah satu tindakan pemenuhan fungsi kekuasaan jawa dalam konteks modern yang tersamar.<sup>33</sup> Terakhir, dikeluarkannya Ketetapan MPRS No.III/1963 tentang pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno menjadi Presiden seumur hidup, memperjelas posisi kepemimpinan Soekarno sama seperti raja jawa yang tidak dibatasi oleh waktu.

## Nasakom Sebagai Refleksi Sinkretisme

Ketetapan Presiden No.7 Tahun 1959 menyatakan bahwa Nasakom merupakan bentuk kerjasama aliran-aliran politis-ideologis. Soekarno sebenarnya mencoba menghidupkan kembali pemikirannya pada tahun 1926 silam, dimana kepentingan nasionalis, Islam dan marxis dapat cocok satu dengan yang lain.<sup>34</sup> Konsep nasakom bertujuan untuk mengontrol kekuatan-kekuatan yang saling bersaing tersebut dibawah dirinya, bukan untuk mencoba mempersatukannya. Sama halnya dalam paham kekuasaan jawa dimana raja harus bisa menyerap semua unsur disekitarnya, lewat nasakom ia ingin menunjukkan adanya penaklukan penyerapan kekuasaan yang saling

---

<sup>32</sup> Benedict Anderson, *Op.Cit.*, hlm.49.

<sup>33</sup> Benedict Anderson, *Op.Cit.*, hlm.66.

<sup>34</sup> John D. Legge, *Op.Cit.*, hlm.393.

bertentangan dibawah kontrolnya. Dengan demikian Soekarno telah berhasil menunjukkan adanya penaklukan sinkretisme.

## Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kekuasaan jawa yang terlihat dalam praktik-praktik kekuasaan Soekarno era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin menjadikan Soekarno sebagai pusat dari kekuasaan secara kelembagaan. Pengkonsentrasian kekuasaan juga terlihat dari kebijakannya dalam membentuk badan-badan yang mencerminkan kebesarannya. Gelar-gelar yang melekat dengannya juga mencerminkan pemusatan kekuasaan. Pengkonsentrasian kekuasaan diperkuat dengan diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui Ketetapan MPRS No.III/1963. Kebijakan ini menunjukkan posisi Soekarno sama seperti raja-raja jawa dimasa lampau yang tidak mengenal konsep pembatasan waktu dalam memimpin. Terakhir, nasakom menunjukkan adanya unsur penyerapan ideologi yang saling bertentangan dibawah soekarno. Soekarno sukses melakukan penaklukan sinkretisme dengan menyerap hal-hal dari luar dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. (2011). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Anderson, B. (1990). *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Anderson, B. (1991). *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* (1204886766 898787711 M. Budiardjo, Ed.). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahm, B. (1978). *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.
- Feith, H. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Reprint Edition)*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Geldern, R. H. (1956). *Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia*. Ithaca, New York: Southeast Asia Program Cornell University.

# PARAPOLITIKA

Journal of Politics And Democracy

Vol.2 No.2, 2021

Kembaren, E. E. (2012). *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa Dalam Praktik-Praktik Kekuasaan Soekarno Era Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Legge, J. D. (1985). *Sukarno: Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: CV. Muliastari.

Poesponegoro, M. D. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suseno, F. M. (1991). *Etika Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suyanto, I. (1978). *Neo Tradisionalisme dalam Politik dengan Kasus Beberapa Pemikiran Politik Soekarno*. Jakarta: Skripsi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Widjanarko, B. (1988). *Sewindu Dekat Bung Karno*. Jakarta: PT. Gramedia.